

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6/PMK.07/2012 TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DAERAH

Telah Terima dari : Direktur Jenderal Perencanaan dan Statistik Keuangan Bendahara Umum Negara
 Melalui K/PN Jakarta No.
 Tertanggal :

Metal di NO III PPN Sejumlah : Rp.
 Tertanggal :

Untuk Keperluan : Pengalihan Anggaran Transfer ke Daerah TA....
 Bulan :
 Daerah : Prov/Kab/Kota

Daftar Rekan :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH		JUMLAH	Diterima Tanggal
I. PENYALURAN TRANSFER MELALUI KPPN JAKARTA II			
TRANSFER DBH PAJAK			
- DBH PAJAK Bumi, Tanah dan Bangunan	1	Rp.	
- DBH PAJAK Pertambangan	1	Rp.	
- DBH PAJAK Perdagangan, Jasa, dan Jasa	1	Rp.	
- DBH PAJAK Hiburan	1	Rp.	
- Biaya Pemungutan PBB Sisa, Hiburan	1	Rp.	
- DBH PAJAK Hiburan, Hiburan	1	Rp.	
TRANSFER DBH CUKAI			
- DBH Cukai Hasil Tembakau Hiburan	1	Rp.	
TRANSFER DBH SDA			
PERTAMBANGAN UMUM			
- Pertambangan Bumi dan Tambak, Hiburan	1	Rp.	
- Pertambangan Bumi dan Tambak, Hiburan	1	Rp.	
MILYAK			
- Milyak 15% Hiburan	1	Rp.	
- Milyak 15% Hiburan	1	Rp.	
- Milyak 15% Hiburan Hiburan	1	Rp.	
GDS			
- GDS 30% Hiburan	1	Rp.	
- GDS 30% Hiburan	1	Rp.	
- GDS 30% Hiburan Hiburan	1	Rp.	
PANGKALAN			
- Pangkalan Hiburan	1	Rp.	
KHUTANAN			
- KHUTANAN Hiburan	1	Rp.	
- KHUTANAN Hiburan	1	Rp.	
- KHUTANAN Hiburan	1	Rp.	
PERKOTAAN			
- Perkotaan Hiburan	1	Rp.	
TRANSFER DAU			
- Dana Alokasi Umum	1	Rp.	
TRANSFER DAK			
- Dana Alokasi Khusus Hiburan	1	Rp.	
TRANSFER DANA OTONOM KHUSUS			
- Dana Otom. Hiburan	1	Rp.	
TRANSFER DANA PENYUSUNAN			
- Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	1	Rp.	
- Dana Tambahan Profesi Bagi PNS	1	Rp.	
- Dana Bantuan Operasional Sekolah	1	Rp.	
- Dana Insentif Daerah (DID)	1	Rp.	
- Dana Penunjang Infrastruktur Hiburan	1	Rp.	
- Dana Penunjang Pembangunan Infrastruktur Hiburan	1	Rp.	
II. PENYALURAN TRANSFER MELALUI RO II			
DBH PBB Bagian Daerah - Biaya Pemungutan *			
- PBB Daerah Hiburan	1	Rp.	
- Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah Hiburan	1	Rp.	
JUMLAH TOTAL PENDIRIAN TRANSFER			

* Berik PBB meliputi PBB Bagian Daerah, meliputi dana yang digunakan yang diberikan dari RO II sebagai dana hiburan yang bersangkutan.

Dinas tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Honor Bekerja	1
Honor Bekerja	1
Honor Bekerja	1

..... 30....

Bupati / Pejabat yang ditunjuk dengan SK Bupati

NATURA
Rp.6500 -

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W MARTOWARDOJO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6/PMK.07/2012 TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS

KOP SURAT						
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN						
Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota *) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran, Tahap sebagai berikut :						
Penerimaan dan Rekening Kas Umum Negara						
Tahap I	:		Rp			
Tahap II	:		Rp			
Tahap III	:		Rp			
Total	:		Rp			
Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah						
Tahap Ini	:		Rp			
Kumulatif s.d. Tahap Ini	:		Rp			
Sisa Dana DAK di Rekening Kas Umum Daerah						
Persentase Sisa Dana DAK			:		%	

No.	Bidang *)	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d. Tahap Ini	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 3)	7 = (5 - 6)
1.	Pendidikan SD					
2.	Pendidikan SMP					
3.	Kesehatan Pelayanan Dasar					
4.	Kesehatan Pelayanan Farmasi					
5.	Kesehatan Pelayanan Rawat Inap					
6.	Infrastruktur Jalan					
7.	Infrastruktur Irigasi					
8.	Infrastruktur Air Minum					
9.	Infrastruktur Sanitasi					
10.	Prasarana Pemerintahan Daerah					
11.	Kelautan dan Perikanan					
12.	Pertanian					
13.	Ungkungan Hidup					
14.	Keluarga Berencana					
15.	Kehutanan					
16.	Sarana dan Prasarana Perdesaan					
17.	Pertambangan					
18.	Keselamatan Transportasi Darat					
19.	Lingkungan Perdesaan					
20.	Perumahan dan Pemukiman					
21.	Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan					
22.	Transportasi Perdesaan					
Jumlah						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demiikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal
Kepala Daerah

Nama

Keterangan :
 *) Urutan Bidang disesuaikan dengan alokasi DAK yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan pada setiap tahun anggaran.

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6/PMK.07/2012 TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN
PENYEDIAAN DANA PENDAMPING

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN DANA PENDAMPING

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota *)
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota *)..... telah/akan *)
menyediakan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus sekurang-kurangnya 10% untuk
masing-masing bidang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan *) Tahun Anggaran 2011.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....

Kepala Daerah.....

Nama

*) Ceret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
AGUS D.W MARTOWARDOJO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6/PMK.07/2012 TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

KOP SURAT					
DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DAK TAHUN TAHUN					
REKAPITULASI SP2D YANG DITERBITKAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN					
No	SP2D		NILAI ¹⁾		KETERANGAN ²⁾
	Nomor	Tanggal	DAK	DANA PENDAMPING	
A. PENDIDIKAN SD					
1	001		Rp -	Rp -	
2	002		Rp -	Rp -	
3	dst		Rp -	Rp -	
J U M L A H			Rp -	Rp -	
B. PENDIDIKAN SMP					
1	001		Rp -	Rp -	
2	002		Rp -	Rp -	
3	dst		Rp -	Rp -	
J U M L A H			Rp -	Rp -	
C. KESEHATAN PELAYANAN DASAR					
1	001		Rp -	Rp -	
2	002		Rp -	Rp -	
3	dst		Rp -	Rp -	
J U M L A H			Rp -	Rp -	
D. KESEHATAN PELAYANAN FARMASI					
1	001		Rp -	Rp -	
2	002		Rp -	Rp -	
3	dst		Rp -	Rp -	
J U M L A H			Rp -	Rp -	
JUMLAH TOTAL			Rp -	Rp -	

TEMPAT, TANGGAL BJLAN TAHUN

Kepala Daerah³⁾

NAMA

Keterangan :

¹⁾ Disi dengan nilai penyerapan DAK (murni) dan Dana Pendamping.

²⁾ Disi bila ada yang perlu dijelaskan.
 Misal: nilai SP2D yang dilaporkan melebihi dana yang telah diterima Pemda dalam RKUD, sehingga sebagian nilainya akan dimasukkan dalam laporan berikutnya.

³⁾ Penandatanganan hanya dapat diwakilkan minimal kepada Kepala Biro/ Kepala DPKAD / Kepala BPKAD/ Kabag Keuangan (apabila tidak ada struktur DPKAD/BPKAD) dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W MARTOWARDOJO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6/PMK.07/2012 TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">KOP SURAT</div>					
LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN					
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara					
Tahap I	:			Rp	
Tahap II	:			Rp	
Tahap III	:			Rp	
Total	:			Rp	

No.	Bidang *)	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)	Sisa DAK di Kas Daerah	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s.d 31 Desember 2012
1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6
1.	Pendidikan SD				
2.	Pendidikan SMP				
3.	Kesehatan Pelayanan Dasar				
4.	Kesehatan Pelayanan Farmasi				
5.	Kesehatan Pelayanan Rujukan				
6.	Infrastruktur Jalan				
7.	Infrastruktur Irigasi				
8.	Infrastruktur Air Minum				
9.	Infrastruktur Sanitasi				
10.	Prasarana Pemerintahan Daerah				
11.	Kebudayaan dan Perikanan				
12.	Pertanian				
13.	Lingkungan Hidup				
14.	Keluarga Berencana				
15.	Kehutanan				
16.	Sarana dan Prasarana Persewaan				
17.	Perdagangan				
18.	Keselamatan Transportasi Darat				
19.	Jalanan Perdesaan				
20.	Perumahan dan Permukiman				
21.	Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan				
22.	Transportasi Perdesaan				
	Jumlah				

Tempat, Tanggal
 Kepala Daerah

 Nama

Keterangan :

*) Urutan Bidang disesuaikan dengan alokasi DAK yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan pada setiap tahun anggaran.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W MARTOWARDOJO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6/PMK.07/2012 TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN s/d

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota *) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2003 s.d. 2010 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Sisa DAK pada Akhir Tahun Anggaran		Penggunaan Sisa DAK Tahun Sebelumnya Pada Tahun berikutnya	
		Rupiah	Bidang	Rupiah	Bidang
1	2	3		4	5
1.	TA. 2003				
2.	TA. 2004				
3.	TA. 2005				
4.	TA. 2006				
5.	TA. 2007				
6.	TA. 2008				
7.	TA. 2009				
8.	TA. 2010dst				
	Jumlah				

Bukti bukti realisasi pembayaran atas penggunaan sisa DAK kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :

*) D diisi sesuai bidang yang dibiayai dari sisa DAK untuk setiap tahun anggaran

Tempat, tanggal
Kepala Daerah

N/A/A

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 AGUS D.W MARTOWARDOJO